

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Membicarakan isitilah pluralitas atau keragaman dalam tataran berbangsa dan bernegara, secara normatif merupakan pemberian (*given*), kepelbagaian (*diversity*), dan keniscayaan (*neccesery*) dalam tatanan hidup individu maupun kolektif dibawah sistem Ilahiah secara praktis dan universal yang terdapat pada umat manusia sebagai makhluk beragama. Kondisi tersebut menjadi landasan yang mengisyaratkan makna tentang pola hidup masyarakat plural dalam bingkai struktur kesatuan.<sup>1</sup> Fenomena tersebut menurut Fazlur Rahman disebut dengan teori *double movement*, yaitu tindakan atau upaya mendorong gerakan komunitas muslim dan non muslim yang plural untuk hidup lebih dinamis.<sup>2</sup>

Pada tataran konsep teologi Islam, keragaman merupakan *sunnatullah* yang diberikan oleh Allah SWT sebagai media terlaksananya integrasi sosial diantara umat manusia. Hal ini di gambarkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“wahai manusia sungguh, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa”.

Dari ayat di atas, tersirat bahwa keberadaan pluralitas dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerima ajaran toleransi agar dapat tumbuh di tengah-tengah umat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa derajat seseorang tidak diukur berdasarkan bangsa atau suku, melainkan oleh tingkat taqwa, yang menjadi penunjuk kemuliaan seorang manusia.

<sup>1</sup> Burhanuddin Tidore. (2020). *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon 1999-2002*. Tangerang: YPM, h. 2

<sup>2</sup> Kamarudin Hidayat. (1996). *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*. Jakarta: Paramadina, h. 151

Dalam perspektif teologi, semua agama pada dasarnya mengarahkan manusia untuk hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Dalam konteks ajaran teologi Islam, Islam dipandang sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk membawa kedamaian dan kasih sayang bagi manusia serta alam semesta tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang menyebabkan konflik bukanlah bagian dari ajaran Islam.

Dalam konteks keindonesiaan, pluralitas atau keragaman merupakan realitas yang tak terhindarkan. Semboyan "Bhineka Tunggal Ika" mencerminkan bahwa Indonesia adalah tempat di mana berbagai perbedaan, seperti bangsa, suku, bahasa, dan agama, hidup bersama. Meskipun berbeda, tetap satu, menjadi kalimat yang mengikat perbedaan untuk menjalani kehidupan dalam kedamaian dan saling toleransi dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana, keberagaman dapat menjadi sumber konflik, disharmoni, dan disintegrasi bangsa. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya lahir sebagai upaya mewujudkan pluralisme bangsa dan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam eksistensi bangsa yang kokoh.

Kajian sosiologi tentang keragaman secara eksplisit dapat dilihat pada konsep sejarah, dimana setiap komunitas sosial yang hidup dizaman klasik sering mengalami hubungan keretakan hubungan, disebabkan oleh adanya perbedaan menjadi sumber perpecahan berujung pada terjadinya konflik sebagai dinamika sejarah dan unsur persinggungan tindakan sosial umat manusia.<sup>3</sup> Maka diperlukan ruang dialog lintas agama sebagai wujud dari ajaran toleransi, penguatan ketahanan dan integrasi bangsa. Pada bagian lain, Durkheim mengatakan bahwa perspektif ilmu sosiologi yang paling berat adalah menimbang aspek konsensus dan menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, lebih jauh Durkheim mengakui kedudukan agama sebagai refleksi spiritual sekaligus mencirikan fungsi agama untuk mengintegrasikan sistem-sistem sosial ketika terjadi konflik komunal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nunung Burhanuddin. (2007). Teologi Sosial: Rekatualisasi Nilai-nilai Kultural Menuju Transformasi Masyarakat. Dalam *Indo-Islamic: Jurnal Internasional of Islamic Science*. Vol. 4, No. 1, h. 94

<sup>4</sup> Burhanuddin Tidore. (2020). *Resolusi ...*, h. 3

Sebagai bangsa yang plural, Indonesia dihuni oleh berbagai ragam suku bangsa. Oleh karena itu, dewasa ini Indonesia diperhadapkan ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa peristiwa konflik kongkrit dalam kajian ilmu konflik di Indonesia, banyak di temukan dalam masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional. Konflik yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan cukup serius yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Selama satu dekade terakhir, lanskap politik Indonesia telah diwarnai oleh berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Perkembangan ini menunjukkan kerapuhan keutuhan dalam kehidupan beragama. Baik dalam bentuk kekerasan yang termanifestasi secara langsung maupun yang tersirat, penggunaan simbol-simbol agama terus menyebar dan meningkat. Indikasi tentang keberagaman, terutama dalam konteks toleransi antar umat beragama di Indonesia, saat ini menjadi sorotan internasional karena berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Perseteruan antar suku dan agama tampak di berbagai tempat, semangat toleransi telah meredup, dan fondasi peradaban bangsa yang berakar pada keberagaman seolah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat memperhatikan. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia tidak mungkin berada dalam *uniformitas* budaya, agama, atau etnik. Namun, kebijakan rezim Orde Baru telah menyebabkan keretakan dalam pluralitas bangsa. Kebijakan yang mengadvokasi keseragaman dan kesatuan dalam konsep berpikir telah membuat masyarakat Indonesia enggan untuk memahami keberadaan komunitas lain yang berbeda dari segi etnis, budaya, dan agama. Akibatnya, masyarakat cenderung terperangkap dalam pemikiran yang

terkotak-kotak dalam primordialisme-sektarianisme, yang menghasilkan sikap tertutup, saling mencurigai, dan prasangka buruk terhadap sesama warga negara.<sup>5</sup>

Pemahaman sempit terhadap pluralitas nayatanya masih tergantung dari tradisi-tradisi lama, baik tradisi keagamaan, budaya, adat, hukum mapapun politik. Dominasi pemahaman sempit semacam ini tentu merugikan bagian-bagian elemen masyarakat yang memiliki niat baik (*political will*) dalam membangun konsep berbangsa dan bernegara kearah lebih, terbuka, toleran, demokratisi dan transparan. Konflik atas nama agama dan etnis mecuat kepermukaan, perbedaan budaya, adat istiadat, dan agama tak jarang menjadi akar merebaknya konflik sosial.<sup>6</sup>

Pluralitas di Indonesia memang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, seringkali kesadaran untuk saling menghormati, memahami, dan mengakui pluralitas sebagai bagian dari kesadaran individu dan kolektif belum terwujud sepenuhnya, bahkan cenderung terhalang oleh sikap menutup diri terhadap keberadaan orang lain. Akibatnya, hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konsep mayoritas dan minoritas pun menjadi khas dalam perjalanan bangsa ini. Di beberapa wilayah, Islam dan Kristen mungkin dianggap mayoritas dari segi agama, namun pada saat yang sama, mereka bisa dianggap sebagai minoritas dalam hal ekonomi dan juga etnis.<sup>7</sup>

Titik awal terjadinya konflik dapat ditelusuri pada krisis ekonomi, ideologi, dan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Krisis tersebut menyebabkan ketidakharmonisan di berbagai struktur sosial masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya melemahkan negara secara keseluruhan dan memberikan peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan diri melalui tindakan anarkis. Secara ideal, konflik timbul dari ketidakamanan, ketakutan, kecemasan, ketidakadilan, dan berbagai perselisihan politik yang menggunakan nama masyarakat sebagai kedok. Hal ini sering kali berujung pada kekerasan sosial dan sentimen etnis, agama, dan ras.

---

<sup>5</sup> Zuly Qodir. (2001). *Agama Dalam Bayang-bayang Kekuasaan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 35

<sup>6</sup> Zuly Qodir. (2001). *Agama ...*, h. 36

<sup>7</sup> Zuly Qodir. (2001). *Agama ...*, h. 37

Melacak sumber-sumber pemicu konflik sosial di Indonesia, seperti konflik di Maluku, tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik bangsa. Menurut Bertrand, krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia hingga bulan Mei 1998 telah menciptakan gejolak sosial dan ketidakstabilan di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi kelompok-kelompok sosial yang selama 32 tahun berada di bawah tekanan rezim Orde Baru untuk bangkit secara bersamaan, mengubah diri menjadi gerakan reformasi, dan melakukan demonstrasi di luar mekanisme demokrasi untuk menuntut pertanggungjawaban politik dari pemerintah Orde Baru.<sup>8</sup>

Tahun 1998 meninggalkan sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang plural. Kerusuhan, pembantaian, permusuhan, dan penjarahan menjadi fenomena yang mewarnai perjalanan bangsa ini. Konflik merebak di kota-kota besar seperti Jakarta pada tanggal 11-13 Mei 1998 dan 14-15 Mei 1998 di Solo. Namun, ingatan masyarakat terhadap konflik tersebut belum usai, kejadian serupa kembali terjadi di Ketapang dan Kupang pada Desember 1998. Tahun berikutnya, pada tahun 1999, terjadi konflik di Ambon yang meletus pada Hari Raya Idul Fitri, bertepatan dengan perayaan umat Islam yang sedang berlangsung.<sup>9</sup>

Keberhasilan gerakan reformasi telah mendorong terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Namun, pasca jatuhnya otoritas pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, muncul fenomena yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya dan menguatnya eskalasi konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Di satu sisi, proses reformasi berhasil membawa rakyat Indonesia ke arah kebebasan dalam proses bernegara. Namun, di sisi lain, reformasi juga menimbulkan kerapuhan dan kekoyakan dalam sistem bernegara. Masa transisi dalam reformasi tampaknya membawa berbagai fenomena yang memprihatinkan, seperti isu disintegrasi bangsa, separatisme, radikalisme, anarkisme, dan meningkatnya konflik-konflik sosial.

---

<sup>8</sup> Burhanuddin Tidore. (2020). *Resolusi ...*, h. 6

<sup>9</sup> Zuly Qodir. (2001). *Agama ...*, h. 53-55

Maluku merupakan provinsi di Indonesia yang masyarakatnya cukup mejemuk, perbedaan suku, budaya dan agama menjadi realitas yang ikut mewarnai hubungan antar masyarakat di wilayah ini. Keberadaan 100 suku dan sub suku, 6 agama resmi dan agama-agama suku, dan 117 bahasa,<sup>10</sup> merupakan potret realitas akan pluralitas. Namun tidak dapat dipungkiri perbedaan sering menjadi alasan terjadinya konflik etnis dan agama. Oleh karena itu pluralitas yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada munculnya setimen etnis dan agama yang berujung pada konflik SARA ditengah-tengah sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Konflik Ambon Maluku berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Peristiwa demi peristiwa konflik disertai dengan kekerasan hebat terjadi dimana-mana, dihampir seluruh kepulauan Maluku dari waktu ke waktu. Konflik ini telah mengakibatkan kehancuran barbagai sarana sosial-ekonomi dan menimbulkan korban kemanusiaan di hampir seluruh kepulauan Maluku. Hal tersebut telah menyebabkan hampir keseluruhan masyarakat di Maluku menjadi korban akibat konflik yang berlangsung.<sup>12</sup>

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru Mei 1998, Maluku menjadi salah satu ladang konflik. dilansir dari majalah *tempo* sampai dengan tahun 2001 jumlah korban berkisar 8000.<sup>13</sup> Konflik yang terjadi sampai dengan tahun 2002 menurut laporan berkisar 13.426 korban jiwa dalam kurun waktu tiga tahun.<sup>14</sup> Penerapan darurat sipil dilakukan pemerintah untuk meminimalisir konflik yang ada, namun konflik terus terjadi dengan menimbulkan gelombang pengungsi cukup tinggi. menurut laporan Gebrnur Maluku pada rapat koordinasi Polkam, menjelaskan bahwa sejak penerapan Darurat Sipil di Maluku 26 Juni 2000-Januari 2002,

---

<sup>10</sup> Abdul Ghani Kasuba. (2019). Resolusi Konflik dan membangun Perdamaian di Provinsi Maluku. Dalam Racma Fitriani, dkk. *Merawat Perdamamain 20 Tahun Konflik Maluku*. Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 6

<sup>11</sup> Hidayat Hasan dan Sulasman. (2022). Rekonsiliasi Konflik Ambon Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Pela Gandong* 1999-2002. *Tsaqofa*, Vol.20, No.2, Tahun 2022, h. 74

<sup>12</sup> Lambang Trijono. (2001). *Kelur Dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. v

<sup>13</sup> *Tempo*, 4 Maret 2002

<sup>14</sup> Pieter George Manoppo. (2005). *Resolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas Korman: Sebuah Pendekatan Psikososial di Maluku*. Surabaya: Srikandi, h. 3

jumlah pengungsi akibat konflik Maluku mencapai 330.758 jiwa<sup>15</sup> yang tersebar di beberapa wilayah di provinsi Maluku.

Konflik Maluku terjadi dalam kurun waktu tahun 1999-2002, merupakan peristiwa kelam dan terbesar dalam sejarah hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Konflik yang melibatkan dua agama besar berakibat pada hancurnya relasi sosial, kehidupan antar pemeluk agama tersegregasi, jatuhnya ribuan korban jiwa, hancurnya rumah-rumah, hilangnya nyawa dan kerugian materi yang luar biasa.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, konflik ini menjadi memori kolektif yang tersimpan rapih dalam ingatan masyarakat Maluku. Sehingga harapan untuk membangun kembali sistem kehidupan sosial yang sempat hancur akibat konflik terus hidup, bahkan menjadi tanggung jawab semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat Maluku.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai pola rekonsiliasi. Hasilnya hanyalah korban jiwa yang kembali berjatuhan setelah dilakukan berbagai upaya rekonsiliasi tersebut. Perundingan di Malino pada bulan Februari 2002 difasilitasi oleh pemerintah pusat melibatkan dua komunitas agama yang bertikai, baik tokoh agama dan kaum intelektual. Namun hasil yang didapatkan setelah pertemuan Maluku di Malino hanyalah tangisan dan korban jiwa. Karena pada tanggal 3 April pukul 11.30 WIT terjadi peledakan bom di jalan Yaan Paays yang mengakibatkan kurang lebih 58 orang menjadi korban. Pristiwa yang serupapun terjadi pada tanggal 25 April bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS).<sup>17</sup>

Konflik Ambon-Maluku menyimpan cukup banyak kompleksitas kenangan pahit dan menimbulkan banyak pertanyaan terkait penyebab terjadinya konflik yang terjadi secara simultan dalam kurun waktu tiga tahun. sehingga menimbulkan banyak kerugian dan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi. Oleh karena itu, menurut Buhanudin Tidore bahwa:

“Menarik jika kita berbicara mengenai konflik di Ambon Maluku. Konflik itu terjadi sudah barang tentu ada sebab-sebab atau latar belakang.

---

<sup>15</sup> Pieter George Manoppo. (2005). *Resolusi ...*, h. 3

<sup>16</sup> Hidayat Hasan dan Sulasman. (2022). *Rekonsiliasi ...*, h. 74

<sup>17</sup> Siwalima. Edisi 4 Mei 2002.

Menurut saya dan saya melihat ini sangat betul-betul konflik ini berada di titik puncak pada tanggal 19 Januari 1999 sudah 22 tahun silam. Pada saat itu bertepatan dengan umat Islam sedang melakukan hari raya Idul Fitri. Peristiwa ini menjadi sejarah yang sampai pada saat ini selalu di ingat. Nah ada beberapa hal yang menjadi latarbekangi konflik tersebut secara akademik yaitu faktor politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan hukum”.<sup>18</sup>

Konflik Ambon-Maluku dipicu oleh berbagai faktor melibatkan dua kelompok agama terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya agar terwujudnya kedamaian. salah satu upaya pemerintah diawal-awal konflik, berdasarkan hasil rapat di Istana negara. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan darurat sipil dengan harapan aparat keamanan mampu mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum dan pemulihan keamanan di Maluku, khususnya di Ambon.<sup>19</sup> Kebijakan darurat militer tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat Maluku. Penolakan demi penolakan muncul dari pihak-pihak yang memandang bahwa penerapan Darurat Militer di Ambon-Maluku bukanlah merupakan solusi yang tepat di dalam upaya membangun perdamaian.

upaya lain dalam membangun perdamaian di Maluku adalah dilakukanya perjanjian Malino II pada tanggal 11-12 Februari 2002, upaya tersebut mengantarkan kehidupan sosial umat beragama di Maluku perlahan normal dan pulih kembali.<sup>20</sup> Namun trauma akibat konflik masih menyelimuti kehidupan di Maluku. Oleh karena itu rasa khawatir dan curiga masih menjadi bagian dari masyarakat Maluku dalam menjalani kehidupanya.

Menurut Pendeta Max Takaria untuk mengembalikan hubungan yang retak akibat konflik, maka pemerintah, tokoh adat dan masyarakat setempat perlu untuk menegaskan kembali keberadaan *pela gandong*, melaksanakan panas *pela*, menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam *pela gandong*, melakukan kegiatan-kegiatan yang menghidupkan perjumpaan dan meyakinkan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bpk. Burhadnuddin Tidore 29 Maret 2023 di Kampus IAIN Kota Ambon

<sup>19</sup> Siwalima. Edisi 1 Mei 2002

<sup>20</sup> Hidayat Hasan dan Sulasman. (2022). Rekonsiliasi ..., h. 74

kembali bahwa *resonansi pela gandong* merupakan kekuatan penyadaran untuk merajut kembali mata rantai persaudaraan sebagai anak negeri Maluku.<sup>21</sup>

*Local wisdom* pada hakekatnya muncul sebagai reaksi manusia terhadap segala rintangan yang dihadapi dalam kehidupan. Seperti dikemukakan Koentjaraningrat, Kebudayaan mencakup keseluruhan perbuatan dan ciptaan manusia yang berkaitan dengan keberadaan umat manusia, yang diperoleh melalui pembelajaran. sebagaimana Teori Fungsionalisme yang di kemukakan oleh Talcot Parsons, yang berpendapat bahwa suatu komunitas terintegrasi berdasarkan konsensus anggotanya mengenai nilai-nilai sosial memungkinkan mereka untuk mengatasi perbedaan, sehingga menjadikan masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, masyarakat adalah gabungan dari sistem sosial yang saling terkait dan saling bergantung. Teori lain yang digunakan adalah teori fungsionalisme universal. Menurut Robert Merton, semua bentuk sosial dan budaya yang dibakukan memiliki fungsi yang bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut di atas, budaya *Pela Gandong* memiliki nilai positif dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Maluku Tengah.

*Pela gandong* secara umum merupakan pola ikatan yng membentuk hubungan persaudaraan antar satu negeri/desa dengan yang lainnya, tanpa melihat latar belakang agama.<sup>22</sup> Pengertian lain mengartikan *pela gandong* sebagai konsep yang mencerminkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan.<sup>23</sup> Menurut Lakollo *pela gandong* adalah perserikatan negeri-negeri di pulau-pulau Ambon-*lase* dengan satu atau beberapa negeri di pulau Seram didasarkan pada persaudaraan sekandung sejati, diatur dalam perjanjian baik lisan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pendeta Max Takaria. 12 April 2023 di Kantor Kalsis GPM Kota Ambon

<sup>22</sup> Hidayat Hasan dan Sulasman. (2022). Rekonsiliasi ..., h. 81

<sup>23</sup> Direktorat Jendal Kebudayaan dan Departemen Pendidikan Nsional. (2002). *Lembaga Budaya Pela dan Gandong di Maluku: Latar Sejarah, Peranan dan Fungsinya*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional RI, h. 3

maupun tulisan dan pihak-pihak yang terikat janji dituntut untuk tunduk pada isi perjanjian yang dijadikan sebagai hukum bagi implementasi janji persaudaraan.<sup>24</sup>

Tradisi *Pela gandong* hidup dan terpelihara sejak lama di pulau Seram, Ambon dan *lease*. hubungan persahabatan dan persaudaraan ini sangat dihargai sejak lama. *Pela gandong* menekankan pentingnya toleransi, kerukunan, saling mencintai, dan gotong royong, yang memungkinkan masyarakat Maluku hidup damai di masa penjajahan. Terlepas dari segala rintangan yang mungkin muncul, ikatan persahabatan dan persaudaraan ini tetap dihargai dan dilindungi.

Lebih lanjut, pranata *pela* dan *gandong* merupakan fenomena budaya yang telah ada sejak lama, dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial masyarakat Maluku Tengah. Tujuan dari pranata *pela gandong* tersebut adalah untuk membina hidup berdampingan secara damai dan saling membantu antara dua atau lebih masyarakat, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal nilai agama, ekonomi, estetika, politik, dan sosial budaya. Hubungan ini dibangun dan dibina dalam konteks budaya seperti itu selalu mengedepankan penghargaan atas persamaan hak dan kewajiban dalam interaksi sosial. pranata *pela* sangat mengakar di Maluku Tengah, dengan beragam adat dan kebiasaan yang menjadi ciri utama pola perilaku yang unik. Ironisnya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan, namun hidup berdampingan secara damai dan toleran seringkali terganggu oleh faktor eksternal yang perlu dikaji dan dianalisis secara cermat. Konflik Maluku-Ambon adalah pengingat menyakitkan dari kenyataan ini, dan penting untuk bersikap bijak dan hati-hati dalam menilai nilai lembaga *pela* dan *gandong* yang telah menjadi sumber kebanggaan dan aset bagi daerah tersebut.<sup>25</sup>

Hal di atas mengindikasikan bahwa, *pela gandong* sebagai pranata sosial yang memiliki nilai filosofis dan nilai sejarah merupakan media yang tepat dalam mengintegrasikan kembali kehidupan masyarakat seperti semula pasca konflik. Artinya penyelesaian konflik dengan pendekatan pranata sosial *pela gandong*

---

<sup>24</sup> Chairussani Abbas Sopamena. (2020). *Filosofi Pela Gandong Katup Penyelamat Masyarakat Maluku*. Yogyakarta: Deepublish, h. 1

<sup>25</sup> Direktorat Jendral Kebudayaan dan Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Lembaga ...*, h. 1-2

sesuai konteks dan relevan dengan konflik itu terjadi. Karena pranata sosial seperti kearifan lokal *pela gandong* sangat potensial dalam penyelesaian konflik dan merupakan media untuk merekatkan kembali hubungan antar agama. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji kembali konflik di Maluku dan menjadikan *local wisdom pela gandong* sebagai media rekonsiliasi konflik antar umat beragama.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Maluku merupakan wilayah yang beragam, baik dari segi bahasa, suku, ras, maupun agama. Keberagaman tersebut telah membentuk pranata sosial *pela gandong* yang bertujuan untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di antara masyarakat. Maluku merupakan wilayah yang beragam, baik dari segi bahasa, suku, ras, maupun agama. Sebagai provinsi yang plural, Maluku memiliki pranata sosial *pela gandong* yang hadir untuk mengakhiri konflik dengan gagasan membentuk hubungan perausadaraan antar negeri atau desa dengan negeri atau desa lainya untuk hidup secara harmonis dalam kurun waktu yang lama. Namun, konflik yang terjadi di Maluku pada tahun 1999-2002 menjadi peristiwa kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Maluku. Konflik tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga merusak sistem kekeluargaan, toleransi, dan sosial yang telah terbangun selama berpuluh-puluh tahun. Luka mendalam yang ditimbulkan oleh konflik tersebut masih membekas hingga saat ini.

Berdasarkan pernyataan di atas, rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya konflik di Ambon tahun 1999-2003?.
2. Bagaimana pemaknaan *pela gandong* sebagai Media Resolusi konflik di Ambon?.
3. Bagaimana proses rekonsiliasi konflik di Maluku berbasis kearifan lokal *pela gandong*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini merupakan hasil dari penelitian atas dasar-dasar yang sebelumnya telah difokuskan dalam perumusan masalah dan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami rekonsiliasi konflik di Maluku berbasis kearifan lokal *Pela Gandong* tahun 1999-2002. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rekonsiliasi yang berbasis pada kearifan lokal di Maluku tahun 1999-2002. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, terutama di bidang sejarah dan sosiologi, serta memberikan masukan bagi kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mengatasi permasalahan yang menimbulkan konflik di Maluku pada masa kini.

#### 2. Khusus

- a. Menjelaskan proses terjadinya konflik yang melibatkan komunitas Islam dan Kristen di Maluku pada tahun 1999-2002.
- b. Mengetahui pemaknaan *Pela Gandong* sebagai media rekonsiliasi konflik, termasuk sejarah lahirnya kearifan lokal *pela gandong*, dan nilai-nilai perdamaian.
- c. Mengidentifikasi proses rekonsiliasi konflik di Maluku berbasis kearifan lokal *pela gandong*?

### D. Kegunaan penelitian

Penelitian dengan judul "Rekonsiliasi Konflik Di Maluku Berbasis Kearifan Lokal 1999-2002: Studi Analisis Tradisi *Pela Gandong*" memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman tentang sejarah konflik Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang sejarah konflik Indonesia, khususnya dalam konteks Maluku pada tahun 1999-2002. Dengan

mempelajari konflik di Maluku, kita dapat memahami bagaimana sikap yang harus diambil dalam menyikapi konflik horizontal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. sehingga dalam pengambilan tindakan nantinya kita mampu berada pada posisi yang tepat dalam rangka memberikan kontribusi nyata untuk perdamaian.

2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang faktor yang mendorong terjadinya konflik dan upaya penyelesaian dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Memahami faktor pendorong terjadinya konflik merupakan satu keharusan, sehingga kita mampu bersikap dengan baik dan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.
3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mempelajari sejarah konflik di Maluku pada khususnya dan juga menjadi gambaran umum dalam konteks konflik nasional. Dengan mempelajari konflik di Maluku kita dapat memahami realitas dan dinamika Indonesia pada saat itu. Sehingga kita mampu mengetahui korelasi konflik dengan dinamika politik Nasional.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam siskursus tentang sejarah rekonsiliasi konflik Ambon yang berbasis kearifan lokal, terdapat berbagai pemikiran dikalangan akademik melalui kajian spesifik dalam sejumlah karya otoritatif, baik buku, Tesis, maupun jurnal yang berkaitan atau sejalan dengan penelitian ini, diantaranya.

Burhanuddin Tidore, dalam *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon 1999-2002*, penelitian ini merupakan kajian *teologi-kultural historis*. Menurut Burhanuddin dinamika konflik di Ambon menggunakan agama sebagai tindakan sosial dan isu-isu penyebab terjadinya krisis multi level pada arus kepentingan politik. dimana akar konflik Ambon tahun 1999-2002 menurut Burhanuddin sangatlah kompleks, mulai dari isu-isu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, polarisasi agama dan bukan konflik agama. Oleh karena itu dalam upaya menghentikan konflik, muncul gerakan *BakuBae* yang melibatkan

tokoh agama dan *civil society*. Model dari gerakan *BakuBae* berbasis pada prinsip-prinsip dasar ajaran agama dan budaya atau sistem nilai teologi *BakuBae*.<sup>26</sup>

Puslitbang Kehidupan Beragama, dalam Studi Sosiologi/Antropologi Hubungan Antar Kelompok Pasca Konflik Di Ambon, menurut penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan penyebab konflik sebagai faktor dominan yang mengakibatkan berbagai upaya rekonsiliasi yang selalu gagal. Sehingga konflik di Ambon terus terjadi. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi menjadi solusi penyelesaian di Ambon-Maluku.<sup>27</sup>

Pieter George Manoppo, dalam Resolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas Korban: Sebuah Pendekatan Psikososial Di Maluku, pada penelitian ini, Pieter menjadikan lokakarya sebagai media pemecahan masalah (*problem solving workshop- PWS*). Karena menurut Pieter *conflict resolution* sangatlah penting diterapkan melalui lokakarya para pihak untuk resolusi konflik pada tingkat komunal. Khususnya pada konflik kekerasan sosial berkepanjangan dan tidak terselesaikan secara tuntas seperti di Maluku.<sup>28</sup>

Alfitra, dalam Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik, Dan Adat. Terjadinya konflik dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, perbedaan latarbelakang, dan terjadinya perubahan nilai dengan cepat di dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka dalam melakukan penyelesaian konflik harus sesuai dengan konteks dan tempat terjadinya konflik. Sehingga kearifan lokal memiliki tempat untuk dijadikan sebagai media rekonsiliasi konflik.<sup>29</sup>

Wasisto Raharjo Jati, dalam Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan, konflik keagamaan di Maluku tahun 1999-2002 merupakan embrio dari ketidakadilan dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu selama bertahun-tahun. Kedudukan agama pada konflik ini menurut Wasisto hanyalah

<sup>26</sup> Burhanuddin Tidore. (2020). *Resolusi ...*, h. 303-306

<sup>27</sup> Puslitbang Kehidupan Beragama. (2009). *Studi Sosiologi/Antropologi Hubungan Antar Kelompok Pasca Konflik di Berbagai Daerah*. Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama RI, h. 117

<sup>28</sup> Pieter George Manoppo. (2005). *Resolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas Korban: Sebuah Pendekatan Psikososial di Maluku*. Surabaya: Srikandi, h. 80-100

<sup>29</sup> Alfitra. (2017). *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik, Dan Adat*. Jawa Timur: Wade Group, h. 3-5

faktor pendukung (*supporting conflict*). Karena konflik di Maluku menurut penelitian ini lebih mengarah pada perebutan sumber daya politik, ekonomi dan birokrasi. Maka konflik keagamaan di Maluku menurut penelitian ini tidaklah tepat jika diselesaikan dengan pendekatan hukum positif. Oleh karena itu, potensi kearifan lokal dalam masyarakat memiliki peran penting dalam merajut kembali kohesivitas masyarakat dalam proses rekonsiliasi.

Rohaizia Ahmad Asi, dkk. Dalam *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa perjanjian Malino I dan II di Selawesi dan Maluku, pada prinsipnya hanyalah tanda pemulihan konflik. Artinya bahwa proses pemulihan terjadi hanya pada ranah fisik, rekontruksi, dan penyediaan bantuan. Oleh karena itu, munculnya gelombang kritikan dari berbagai pihak terhadap proses janji damai di Malino, merupakan akibat dari tidak ikut sertanya masyarakat adat dalam menuntaskan akar persoalan konflik.<sup>30</sup>

John Pieris, dalam *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Kemanusiaan*, telah menggoreskan luka psikologi yang kelam memilukan dan tragis dalam sejarah Maluku yang dulunya tidak pernah ada. Menganalisis latar belakang konflik, maka dalam penelitian ini pieris menawarkan pendekatan resolusi pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan sebagai realitas konflik.<sup>31</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pada penulisan tesis ini, peneliti melakukan penelitian dengan menjadikan rekonsiliasi konflik di Maluku sebagai obyek kajian dan meletakkan kearifan lokal *pela gandong* sebagai media rekonsiliasi. Sebagaimana di ketahui bahwa Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki keragaman luarbiasa, keragaman ini dapat ditemukan pada, bahasa, ras, suku dan agama. Menariknya adalah masyarakat Maluku dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam kurun waktu yang lama dan sampai pada titik dimana Maluku dikenal akan wilayah yang cukup teloran dan harmonis. Namun dengan terjadinya konflik sepanjang

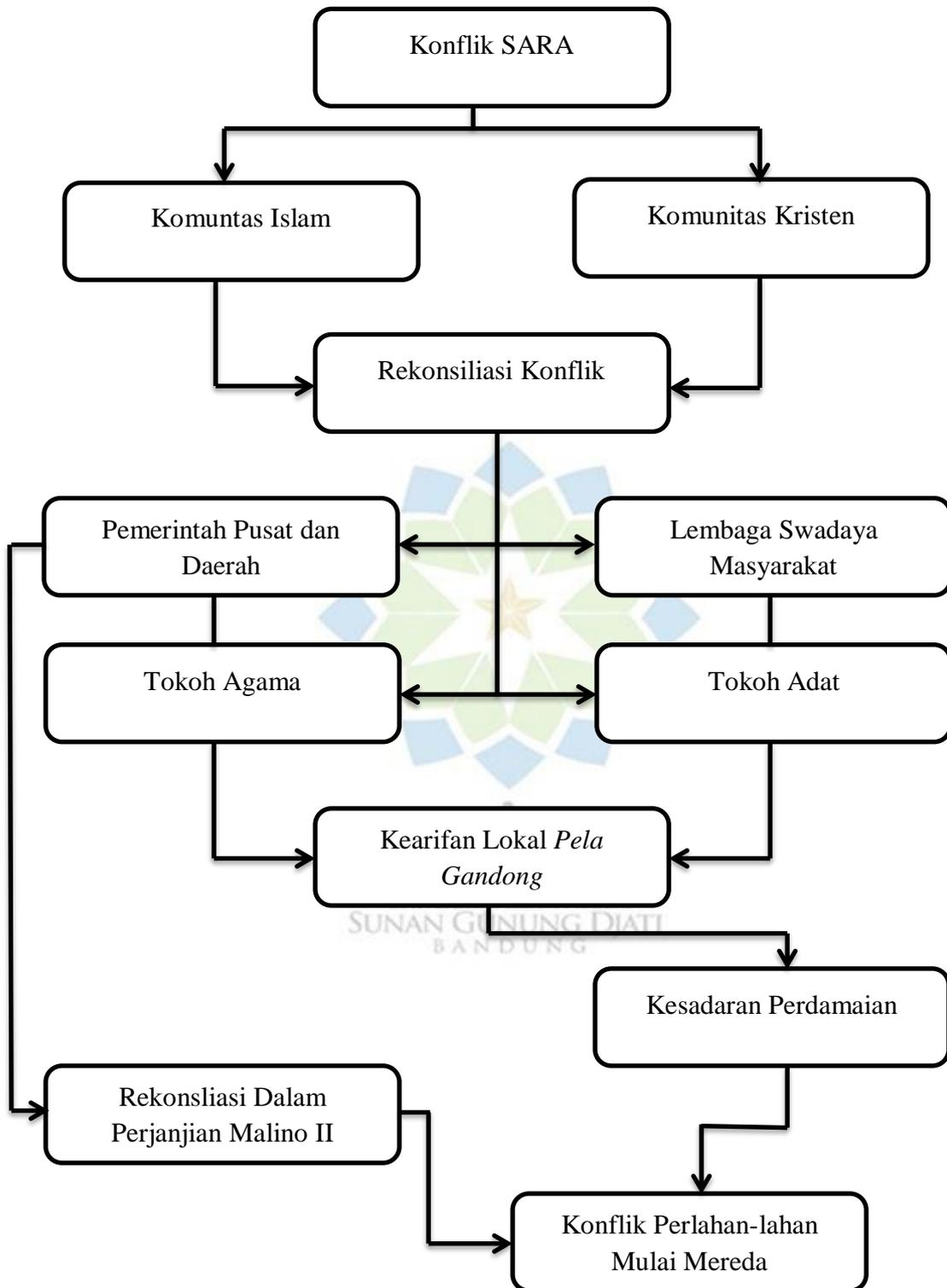
<sup>30</sup> Rohaizia Ahmad Asi, dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Switserland: Center For Humanitairan Dialogue, h. 15.

<sup>31</sup> John Pieris. (2004). *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Kemanusiaan: Alasis Kritis Aspek Politik, Sosial-Budaya, dan Keamanan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 73-92

tahun 1999-2002 meruntuhkan sejarah kedamaian di wilayah ini. padahal jika dilihat dengan jujur, Maluku memiliki kearifan lokal syarat dengan nilai perdamaian yang dikenal dengan *pela gandong*, yaitu suatu gagasan filosofi perdamaian dengan membangun hubungan persaudaraan tanpa melihat perbedaan latar belakang agama.

Terjadinya konflik yang melibatkan dua pemeluk agama yaitu Islam dan Kristen, mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal *pela gandong* tidak hayati dengan baik. Akan tetapi tidak dapat di pungkiri walaupun terjadi konflik yang sangat dahsyat, daerah-daerah yang memiliki ikatan *pela* tidak secara keseluruhan terlibat konflik SARA tersebut, bahkan daerah-dareah tersebut menjadi percontohan di dalam mebangun perdamaian dengan menggunakan media kearifan lokal *pela gandong*.





## G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dengan topik Rekonsiliasi Konflik Di Maluku Berbasis Nilai–Nilai Kearifan Lokal: Studi Analisa Tradisi *Pela Gandong*, merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode sejarah. Metode diartikan suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien.<sup>32</sup> Karena itu, metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dalam penelitian sejarah.

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang khusus digunakan melalui tahapan tertentu.<sup>33</sup> Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber (*heuristic*), kritik sejarah (*Verifikasi*), analisis data (*interpretasi*), dan penulisan (*historiografi*).<sup>34</sup> Maka kekuatan atau kevalidan sebuah karya tulis diukur dari seberapa penting peran metode penelitian yang digunakan.

### 1. Pemilihan Topik

Dalam pemilihan topik judul yang hendak diteliti, harus memper timbangkan tiga hal. pertama, ada kedekatan emosional antar peneliti dengan topik atau judul yang hendak diteliti, kedua, Harus memiliki kedekatan intelektual, dalam artian bahwa topik atau judul yang dipilih tidak terpengruhi oleh emosional yang dimiliki, sehingga tidak terjadi kearah perubahan dari konteks yang diteliti. Ketiga, seorang peneliti diharuskan memiliki rencana untuk melakukan penelitian, dimana rencana ini dilandaskan pada empat hal, antara lain: permasalahan, historiografi, sumber sejarah dan garis besar<sup>35</sup>.

Memilih topik atau judul juga harus mempertimbangkan dari segi nilai atau *value* dimana dapat memberikan penejelasan dalam arti universal yang dimana aspek dari kehidupan manusia yang dianggap penting dan berarti dari

---

<sup>32</sup> Dudung Abdurrahman. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, h. 103.

<sup>33</sup> Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, Cet-1. h. 88.

<sup>34</sup> Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet-1, h. 69.

<sup>35</sup> Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ...*, h. 70-72.

sudut pandang sosial<sup>36</sup>. Mengingat pertimbangan di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil topik penelitian Rekonsiliasi Konflik Ambon Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Tahun 1999-2003 sebagai objek yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini.

## 2. Heuristik

Tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah melibatkan heuristik, yang mengacu pada teknik atau metode yang digunakan untuk menemukan sumber.<sup>37</sup> Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi langsung, atau wawancara. Di zaman sekarang ini, data sejarah dapat bersumber dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Sangat penting bagi seorang peneliti untuk memiliki keterampilan menangani bukti sejarah dan membangun hubungan di antara mereka.

Sumber dapat dikategorikan menjadi sumber primer (langsung) dan sumber sekunder (tidak langsung), serta sumber asli dan palsu. Sumber primer mengacu pada cerita langsung dari individu atau kelompok yang menyaksikan suatu peristiwa. Di sisi lain, sumber sekunder adalah catatan yang diberikan oleh seseorang yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Contoh sumber sekunder meliputi monograf, buku teks, prosiding kongres, makalah, dan proposal. Sumber asli dan palsu masing-masing mengacu pada sumber asli dan palsu.<sup>38</sup>

Penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait konflik etnis di Indonesia, antara lain surat kabar dan buku-buku baik dalam bentuk fisik maupun digital, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Penulis memperoleh banyak sumber dari surat kabar tahun 1999, buku, serta informasi dari internet berupa jurnal dan buku digital. Adapun dari hasil pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan sumber-sumber primer dan sekunder diantaranya:

---

<sup>36</sup> Sulasman. (2014). *Metodologi ...*, h. 88.

<sup>37</sup> Helius Samsudin. (2016). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, h. 55

<sup>38</sup> Marzuki Ab Yass. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Palembang: Proyek SP4 Universitas Sriwijaya, h. 34-35

## a. Sumber primer

### Buku

- 1) Buku putih karya M. Husni Putuhena, Tragedi kemanusiaan dalam kerusuhan di Maluku,
- 2) Buku Karya Lambang Trijono, Keluar Dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku,
- 3) Buku Karya Freddy Pattiradjawane dan Harnold Abel, Tragedi Kemanusiaan Di Maluku,
- 4) Buku Karya Rutam Kastor, Fakta, Data dan Analisis Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat Islam di Ambon-Maluku: Mengungkap Konflik Berdarah Antar Umat Beragama dan Suara Hati Warga Muslim Yang Teraniaya,
- 5) Buku Karya Burhanuddi Tidore, Rekonsiliasi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon 1999-2002,
- 6) Buku Karya Ja'far Umar Thalib, Laskar Jihad Ahlusunnah Waljama'ah Mempelopori Perlawanan Terhadap Kedurjanaan Hegemoni Salibis-Zionis Internasional di Indonesia,

### Koran dan Surat Kabar

- 1) *Suara Maluku*, edisi 7 Mei 1999
- 2) *Suara Maluku*, edisi 8 Mei 1999
- 3) *Suara Maluku*, edisi 12 Mei 1999
- 4) *Suara Maluku*, edisi 17 Mei 1999
- 5) *Suara Maluku*, edisi 25 Mei 1999
- 6) *Suara Maluku*, edisi 24 Juni 1999
- 7) *Kompas*, edisi maret 1999
- 8) *Siwalima*, edisi 2 Februari 2002
- 9) *Siwalima*, edisi 4 Februari 2002
- 10) *Siwalima*, edisi 5 Februari 2002
- 11) *Siwalima*, edisi, 7 Februari 2002

- 12) *Siwalima*, edisi 1 Mei 2002
- 13) *Siwalima*, edisi 2 Mei 2002
- 14) *Siwalima*, edisi 4 Mei 2002
- 15) *Siwalima*, edisi 6 Mei 2002
- 16) *Siwalima*, edisi 7 Mei 2002
- 17) *Siwalima*, edisi 8 Mei 2002
- 18) *Siwalima*, edisi 13 Mei 2002
- 19) *Tempo*, edisi 28 pril 2004
- 20) *Tempo*. Edisi 15 Februari 1999
- 21) *Kontras*, edisi 18 Februari 1999
- 22) *Kontras*, edisi 29 Juni 1999
- 23) *Kompas*, edisi 21 Desember 2001
- 24) *Kompas*, edisi 23 Mei 2002
- 25) *Republika*, edisi 7 Maret 1999
- 26) *Pikiran Rakyat*, edisi 7 Februari 2000

#### **Laporan dan Majalah**

- 1) Laporan Irwan Ariston Napitupulu (Ambon: 17 Gedung Gereja Protestan Maluku “GPM” di Buru Utara Dibakar) 6 Januari 2002
- 2) OCHA (Indonesia: Kekerasan di Ambon) 31 Maret 1999
- 3) *Malajah Time* (Suharto Dalam Bayangan) 8 Februari 1999
- 4) *Liputan 6* (Wapres Pelaku kerusuhan Ambon Ditindak Tegas) 26 April 2002
- 5) Human Rights Watch, Maret 1999
- 6) VOA (Polisi Tangkap Komandan Laskar Jihad) 5 Mei 2002
- 7) MAULA (Mengenai Pola Kerusuhan Ambon 1999: Belajar Dari Sejarah Kelam Masalalu) 21 September 1999
- 8) Laporan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Seruan Penangan Yuridis Terhadap Konflik di Maluku dan Maluku Utara) 24 Februari 2000
- 9) Laporan MUI Kabupaten Maluku Tengah, 7 Januari 2000

**b. Sumber sekunder**

- 1) Buku karya Usma Ks, dkk, Merajut Damai di Maluku; Telaah Konflik Antar Umat 1999-2000
- 2) Buku Karya Eriyanto, Media dan Konflik Ambon
- 3) Buku karya Zuly Qodir, Agama Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan
- 4) Buku Bunga Rampai Karya Rachma Fitriani, dkk, Merawat Perdamaian; 20 Tahun Konflik Maluku
- 5) Buku karya Pieter George Manoppo, Resolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas Korban: Sebuah Refleksi Pendekatan Psikososial di Maluku
- 6) Buku karya Adian Husaini, Gereja-gereja di Bakar: Membedah Akar Konflik Sara di Indonesia
- 7) Buku karya Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000
- 8) Buku karya Tuhana Taufiq A, Konflik Maluku
- 9) Buku karya Suryadi Radjab, Indonesia Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia
- 10) Buku karya Samuel Waileruny, Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku
- 11) Buku Bunga Rampai Puslitbang Kehidupan Beragama, Studi Sosiologi Hubungan antar Kelompok Pasca konflik di Berbagai Daerah
- 12) Buku Azimah Rahayu, Senja Merah di Tanah Maluku
- 13) Buku Bunga Rampai Karya Elizabeth Marantika, dkk, Delapan Dekde GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM Dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat
- 14) Buku Bunga Rampai Karya Jacky Manuputty, dkk, Carita Orang Basudara: Kisah-kisah Perdamaian Dari Maluku
- 15) Buku Karya Chairussani Abbas Sopamena, Filosofi Pela Gandong Katup Penyelamat Masyarakat Maluku
- 16) Buku Karya Andul Manaf Tubaka, Islam Maluku: Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Pela Gandong

- 17) Buku Karya M. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950
- 18) Buku Karya R.Z Leirissa, dkk, Sejarah Kebudayaan Maluku
- 19) Buku Karya A. Watloly, dkk, Menganggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku

### 3. Kritik (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam penyelidikan sejarah melibatkan analisis sumber. Ketika menggunakan sumber-sumber sejarah, penting untuk menilai atau meneliti sumber-sumber yang digunakan. Analisis sumber adalah prosedur meneliti sumber untuk menentukan apakah itu asli atau palsu dan apakah isinya dapat dianggap dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis internal dilakukan untuk memastikan kebenaran isi sumber atau data untuk memperoleh informasi yang akurat atau salah, sedangkan analisis eksternal bertujuan untuk mengetahui keabsahan sumber yang ditelusuri melalui analisis internal.<sup>39</sup> Sumber-sumber yang dibandingkan oleh pengulas atau penulis dalam penelitian sejarah adalah:

#### a. Kritik Eksternal

Dalam bentuk evaluasi eksternal ini, penulis meneliti keaslian sumber dengan memusatkan perhatian pada atribut fisiknya. Jika sumbernya berupa dokumen tertulis, seperti buku, peneliti harus meneliti unsur-unsur yang berkaitan dengan tampilan luarnya, termasuk jenis kertas yang digunakan, tinta yang digunakan untuk menulis, dan gaya bahasa/ejaan yang digunakan oleh penulis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengkritisi sumber-sumber yang diperoleh. Penulis menilai dua sumber: buku-buku yang membahas masalah gaya bahasa atau ejaan yang digunakan oleh penulis buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Bangka, dan tokoh-tokoh adat dan lembaga yang memiliki pengetahuan tentang sejarah Bangka, khususnya kota Muntok. Dalam hal ini, pengarang mempertimbangkan karakteristik fisik,

---

<sup>39</sup> Marzuki Ab Yass. (2004). *Metodologi ...*, h. 35-36

status, dan usia para tokoh. Selain itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penulisnya adalah seorang sejarawan akademis atau sejarawan informal.<sup>40</sup>

Setelah menelaah sumber-sumber sejarah yang ada, khususnya media cetak seperti majalah dan surat kabar, mengenai pemberitaan konflik Ambon, penulis berkesimpulan bahwa media cetak merupakan sumber terpercaya untuk mempelajari pemberitaan konflik Ambon.

#### **b. Kritik Internal**

Berbeda dengan kritik eksternal, kritik internal berfokus pada aspek “dalam” dari materi sumber, khususnya isi kesaksian. Setelah kritik eksternal mengkonfirmasi kebenaran kesaksian tersebut, terserah sejarawan untuk menilai keandalannya. Ini melibatkan penentuan apakah kesaksian itu dapat dipercaya atau tidak.<sup>41</sup> Terbukti, Wahyuana, jurnalis yang menyaksikan langsung konflik Ambon, menulis "media konflik Maluku" di harian Kompas edisi 1 Mei 2004.

#### **4. Intrepretasi**

Fase ketiga dari penelitian sejarah melibatkan interpretasi. Ini mengacu pada pembentukan makna dan hubungan antara fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Interpretasi diperlukan untuk menghidupkan data dan membuatnya bermakna. Orang yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari peristiwa sejarah yang sama, tergantung pada perspektif mereka. Menurut Bekker, interpretasi melibatkan analisis data yang dipilih untuk mengungkap kebenaran otentik yang relevan dengan tema yang sedang dieksplorasi. Analisis historis adalah istilah lain untuk interpretasi, dan ini melibatkan analisis dan sintesis data yang ada. Analisis memerlukan penguraian informasi, sementara sintesis melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk membentuk kesimpulan yang koheren.

---

99 <sup>40</sup> Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, h.

<sup>41</sup> Helisu Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, h. 14

Selama tahap analisis, penulis mengkaji data yang diperoleh dan menggali berbagai kemungkinan yang terkandung di dalamnya. Dengan mensintesis informasi, mereka dapat menarik kesimpulan yang mencerminkan interpretasi yang telah mereka buat. Ini membantu menghubungkan fakta dan data dari berbagai sumber dan memungkinkan penulis untuk mendiskusikan masalah yang mereka jelajahi dalam tulisan mereka.<sup>42</sup>

Penulis menggunakan sumber-sumber sejarah untuk melakukan interpretasi dalam fase penelitian ini. Mereka juga menggunakan pendekatan Komunikasi Massa, yang melibatkan penggunaan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi untuk berkomunikasi dengan audiens yang besar. Pendekatan ini sesuai dengan topik penelitian yang sedang dieksplorasi, oleh karena itu peneliti memilih untuk menggunakannya.

## 5. Historiografi

Setelah menyelesaikan proses heuristik, interpretasi, dan kritik sumber, tahap akhir dari metode sejarah adalah menjawab pertanyaan tentang metodologi apa yang digunakan dalam penulisan sejarah, yang juga dikenal sebagai historiografi. Historiografi melibatkan rekonstruksi masa lalu melalui pendekatan imajinatif berdasarkan data yang diperoleh melalui proses.<sup>43</sup>

Organisasi kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah untuk mencegah peristiwa menjadi kacau. Sementara kronologi mungkin dianggap kurang penting dalam ilmu sosial lainnya, penting dalam ilmu sejarah untuk mengurutkan perubahan sosial secara kronologis.<sup>44</sup> Selama fase ini, penulis menulis ide dan sumber sejarah yang telah ditafsirkan dari sumber sejarah yang diperoleh. Karena penulis menulis tentang sejarah pemikiran, maka digunakan metode penulisan deskriptif analitik.

---

<sup>42</sup> Marzuki Ab Yass. (2004). *Metodologi ...*, h. 43

<sup>43</sup> Luis Gottschalk. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, h. 32

<sup>44</sup> Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ...*, h. 103

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memperoleh pemahaman dan penelahan terhadap tesis ini. sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Dimana secara keseluruhan antara bab satu dengan bab yang lainya memiliki keterkaitan dan berkesinambungan antara pembahasan bab satu sampai bab lima, sehingga terbentuk menjadi satu karya ilmiah yang utuh.

Bab pertama merupakan **BAB I Pendahuluan**. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab Keuda merupakan **BAB II Tinjauan Pustaka**. Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dari setiap variable yang terdpat di dalam penelitian.

Bab Ketiga merupakan **BAB III Metode Penelitian**. Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, serta tempat dan waktu penelitian.

Bab Keempat merupakan **BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian**. Pada baba ini menguraikan tentang deskripsi data dalam hal ini termasuk profil lokus penelitian, pembasahan hasil penelitian, penawaran gagasan, serta kebaruan dan orisinilitas.

Bab Kelima merupakan **BAB V Penutup**. Pada bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.